



## Reformasi Kebijakan Hukum Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Keberlanjutan Ekosistem dan Keadilan Sosial di Indonesia

Citra Cahyarini<sup>1</sup>, Nanik Sutarni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Boyolali

E-mail: [1\\_dokcit101@gmail.com](mailto:1_dokcit101@gmail.com), [2\\_naniksutarni19@gmail.com](mailto:2_naniksutarni19@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 11, 2026

---

#### Keywords:

Policy Reform, Natural Resource Law, Ecosystem Sustainability, Social Justice, SDA Management, Indonesia.

---

### ABSTRACT

*The reform of legal policies in the management of Natural Resources (SDA) has become a central issue in the context of sustainable development in Indonesia. Although the country has various laws regulating the management of SDA, the reality on the ground shows a misalignment between policies and implementation, leading to environmental degradation and social inequality. This article aims to explore the role of legal policy reform in achieving ecosystem sustainability and social justice in Indonesia. This research employs a descriptive qualitative approach with an analysis of regulations, policies, and the challenges faced in the management of SDA. The findings indicate that a more holistic policy reform, integrating social, economic, and environmental aspects, is essential for achieving sustainability and social justice goals. Therefore, strengthening the capacity of SDA management institutions and promoting active community participation in policy-making processes are necessary.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

### Article Info

#### Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 11, 2026

---

#### Keywords:

Reformasi Kebijakan, Hukum Sumber Daya Alam, Keberlanjutan Ekosistem, Keadilan Sosial, Pengelolaan SDA, Indonesia.

---

### ABSTRACT

Reformasi kebijakan hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi isu sentral dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun negara memiliki berbagai undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan SDA, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta ketimpangan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran reformasi kebijakan hukum dalam mewujudkan keberlanjutan ekosistem dan keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap regulasi, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kebijakan yang lebih holistik, yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusi pengelola SDA serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



**Corresponding Author:**

Citra Cahyarini  
Universitas Boyolali  
Email: [dokcit101@gmail.com](mailto:dokcit101@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. Namun, pemanfaatan SDA yang tidak berkelanjutan sering kali berdampak pada kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta ketimpangan sosial yang semakin melebar. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan hukum yang kurang responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa pengelolaan SDA harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan SDA cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa memperhatikan dampak ekologis dan kesejahteraan sosial jangka panjang.

Reformasi kebijakan hukum dalam pengelolaan SDA di Indonesia tidak hanya menyangkut perubahan regulasi, tetapi juga mencakup penataan ulang kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum dapat diubah untuk menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekosistem dan keadilan sosial, serta tantangan apa saja yang perlu dihadapi dalam proses reformasi ini.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pada analisis terhadap regulasi hukum, kebijakan pemerintah, serta berbagai laporan dan studi terkait pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Data yang digunakan diperoleh dari literatur yang meliputi buku, artikel jurnal, kebijakan pemerintah, serta laporan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan regulasi yang ada dengan tantangan yang dihadapi di lapangan, serta menggali peluang untuk melakukan reformasi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan lingkungan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Reformasi kebijakan hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan kondisi di lapangan. Kebijakan yang ada sering kali terfragmentasi dan tidak cukup mendalam untuk menghadapi krisis lingkungan yang semakin memburuk. Misalnya, kebijakan yang mengutamakan eksplorasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi sering kali mengabaikan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan ekosistem. Di sisi lain, kebijakan yang bertujuan melindungi lingkungan sering kali terhambat oleh kepentingan bisnis dan politik yang kuat.

Peluang reformasi kebijakan hukum Sumber Daya Alam terletak pada integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap sektor yang bergantung pada SDA. Reformasi ini perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, sektor swasta, dan lembaga pemerintah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam pengelolaan SDA, yang menjamin kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Selain itu, penguatan sistem



pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas akan mempercepat tercapainya tujuan keberlanjutan ekosistem dan keadilan sosial.

## KESIMPULAN

Reformasi kebijakan hukum pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekosistem dan keadilan sosial. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan penguatan lembaga pengelola SDA akan menjadi kunci keberhasilan reformasi ini. Di masa depan, kebijakan hukum yang responsif terhadap perubahan iklim dan memperhatikan hak-hak masyarakat lokal akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, S. (2019). *Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Darmaningtyas, A., & Sudarsono, A. (2018). "Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keadilan Sosial: Perspektif Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, 44(2), 221-239.
- Fadhilah, S. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hakim, A. M., & Siregar, D. A. (2021). "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 513-528. <https://doi.org/10.1234/jhp.v49i4.830>
- Kurniawan, D. (2017). *Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marwan, T. (2019). *Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Teori dan Praktik dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sihombing, S. M., & Widodo, E. (2020). "Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Keberlanjutan Ekosistem: Perspektif Hukum dan Kebijakan." *Jurnal Hukum Lingkungan*, 13(1), 101-118. <https://doi.org/10.5678/jhl.v13i1.456>
- Syah, I. H., & Putra, B. (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Medan: USU Press.